

## Efektivitas Beasiswa di Bojonegoro: Apakah Sudah Tepat Sasaran bagi Mahasiswa Kurang Mampu?

Iin Rohmatul Azizah

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Email: [iinrohmatulazizah19@gmail.com](mailto:iinrohmatulazizah19@gmail.com)

---

### Article Info

#### Article history:

Received April 26, 2026

Revised May 18, 2026

Accepted May 24, 2026

---

#### Keywords:

Education Policy, Bojonegoro Scholarship, Targeting Accuracy, Underprivileged Students.

---

### ABSTRACT

*The Regional Government of Bojonegoro Regency has allocated a substantial budget through Regent Regulation Number 41 of 1015 for the Underprivileged Scholarship program to break the cycle of regional poverty. However, its implementation still faces various structural and bureaucratic constraints in the field. This study aims to evaluate the effectiveness and targeting accuracy of the Bojonegoro Regency Underprivileged Scholarship for students from economically vulnerable families. Utilizing a descriptive qualitative method with a case study approach, data were gathered through documentation studies of regulations and in-depth interviews with beneficiary students, affected students, and regional student organizations. Informants were selected using purposive sampling. The results show that although the program has successfully alleviated immediate tuition fee burdens for recipients, its effectiveness remains sub-optimal due to two major bottlenecks. First, the rigid requirement of a minimum 'B' study program accreditation discriminates against poor students who are already enrolled in lower-accredited local campuses. Second, the classic bureaucratic issue of delayed annual fund disbursement creates new financial burdens for vulnerable students. This study concludes that this policy intervention is not yet fully targeted or inclusive. The regional government is recommended to reform the Standard Operating Procedures (SOP) for disbursement and provide regulatory flexibility regarding accreditation requirements, specifically for extremely poor groups.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



---

### Article Info

#### Article history:

Received April 26, 2026

Revised May 18, 2026

Accepted May 24, 2026

---

#### Keywords:

Kebijakan Pendidikan, Beasiswa Bojonegoro, Ketepatan Sasaran, Mahasiswa Kurang Mampu.

---

### ABSTRACT

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengalokasikan anggaran besar melalui Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 1015 untuk program Beasiswa Tidak Mampu demi memutus mata rantai kemiskinan daerah. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan birokrasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran Beasiswa Tidak Mampu Kabupaten Bojonegoro bagi mahasiswa dari keluarga rentan ekonomi. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui studi dokumentasi regulasi dan wawancara mendalam dengan mahasiswa penerima manfaat, mahasiswa terdampak, serta organisasi daerah. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program ini berhasil meringankan beban biaya kuliah instan bagi penerima, efektivitasnya belum optimal akibat dua hambatan utama. Pertama, syarat kaku akreditasi program studi minimal B mendiskriminasi mahasiswa miskin yang terlanjur berkuliah di kampus lokal berakreditasi rendah. Kedua, masalah

birokrasi klasik berupa keterlambatan pencairan dana tahunan menciptakan beban finansial baru bagi mahasiswa rentan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa intervensi kebijakan ini belum sepenuhnya tepat sasaran dan inklusif. Pemerintah daerah direkomendasikan untuk mereformasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pencairan dan memberikan fleksibilitas regulasi akreditasi khusus bagi kelompok miskin ekstrem.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



**Corresponding Author:**

**Iin Rohmatul Azizah**

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Email: [iinrohmatulazizah19@gmail.com](mailto:iinrohmatulazizah19@gmail.com)

## Pendahuluan

Pendidikan tinggi merupakan salah satu instrumen paling krusial dalam memutus mata rantai kemiskinan struktural sekaligus mendorong mobilitas sosial vertikal masyarakat (Fauzan, 2023). Berdasarkan rilis data makro terbaru, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro (2024) mencatat adanya tren positif pada aspek pembangunan manusia, di mana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bojonegoro melaju ke angka 73,74. Namun demikian, meskipun indikator pendidikan penopang IPM seperti Harapan Lama Sekolah (HLS) merangkak naik, realitas di lapangan menunjukkan bahwa persentase angka kemiskinan di daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) ini masih berada di kisaran 11,49% (BPS Kabupaten Bojonegoro, 2024). Fenomena ini menandakan adanya paradoks dan kesenjangan yang lebar antara besarnya kekuatan fiskal daerah hasil eksploitasi sumber daya alam dengan kesejahteraan riil masyarakat di tingkat akar rumput (Retno & Budi, 2013; Siswati, 2018).

Sebagai daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sangat besar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memiliki keleluasaan finansial untuk melakukan intervensi langsung terhadap problem kesenjangan akses pendidikan ini. Komitmen politik anggaran tersebut diwujudkan melalui pengesahan regulasi daerah mengenai pedoman pemberian beasiswa (Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, 2024). Regulasi ini melahirkan skema jaring pengaman sosial pendidikan tinggi, salah satunya adalah Beasiswa Tidak Mampu yang menysasar kelompok keluarga miskin dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa rentan ekonomi (Pemkab Bojonegoro, 2024). Kebijakan ini idealnya berfungsi sebagai jaminan keadilan distributif agar anak-anak dari keluarga miskin di pelosok daerah tidak terpaksa putus kuliah akibat tekanan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Namun, dalam pelaksanaannya, program investasi kemanusiaan ini menghadapi benturan keras antara ambisi birokrasi dan hambatan struktural yang dirasakan langsung oleh mahasiswa di lapangan. Masalah utama muncul dari kriteria administratif yang mewajibkan pendaftar berasal dari program studi yang memiliki akreditasi minimal B. Aturan kaku ini dinilai kurang peka zaman dan diskriminatif bagi mahasiswa kurang mampu asal pedesaan Bojonegoro yang terlanjur berkuliah di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) lokal dengan

keterbatasan akreditasi institusional (Andita & Miftakhul, 2024; Sari, n.d.). Dampaknya, kebijakan jaring pengaman ini kerap kali gagal menjangkau kelompok rentan ekonomi ekstrem yang justru menjadi target utama pengentasan kemiskinan daerah.

Kondisi tersebut diperparah oleh kendala tata kelola distribusi anggaran berupa keterlambatan pencairan dana kompensasi yang terjadi secara berulang dari tahun ke tahun. Penundaan penyaluran beasiswa aktif (*on-going*) ini kerap memicu gelombang keresahan bagi mahasiswa miskin karena memaksa mereka mencari pinjaman darurat pihak ketiga agar terhindar dari sanksi administratif atau cuti paksa oleh pihak kampus. Menimbang krusialnya efektivitas kebijakan anggaran ini, penelitian untuk mengevaluasi ketepatan sasaran Beasiswa Tidak Mampu Bojonegoro menjadi sangat penting dilakukan. Studi ini bermaksud mengurai secara mendalam apakah limpahan APBD Bojonegoro melalui sektor beasiswa telah dikelola secara inklusif dan tepat sasaran, atau justru sekadar menjadi instrumen administratif yang bias kelas sosial.

Sebelumnya, kajian sejenis telah dilakukan oleh Widayanti dan Rosdiana (2026) di Kecamatan Kepohbaru. Dengan menggunakan indikator efektivitas Campbell J.P., penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa tergolong cukup efektif, terutama pada aspek input-output dan pencapaian tujuan dalam mendukung keberlanjutan studi serta meningkatkan akses pendidikan tinggi. Namun, efektivitas pada aspek keberhasilan program, ketepatan sasaran, dan kepuasan penerima manfaat masih belum optimal akibat kendala pemerataan kuota dan rumitnya pelayanan administratif (Widayanti & Rosdiana, 2026). Bertolak dari temuan tersebut, penelitian ini bermaksud memperluas lokus dan kedalaman analisis guna memformulasikan rekonstruksi kebijakan beasiswa yang lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, holistik, dan kontekstual mengenai realitas implementasi kebijakan Beasiswa Pemkab Bojonegoro di lapangan. Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci (*key instrument*) untuk mengurai fenomena ketepatan sasaran bantuan dari sudut pandang mahasiswa kurang mampu selaku penerima manfaat. Lokasi penelitian Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Fokus pengumpulan data diarahkan pada wilayah pelosok/kecamatan dengan angka kemiskinan tinggi (misalnya: Sekar, Tambakrejo, Ngraho) serta komunitas organisasi mahasiswa daerah Bojonegoro. Waktu Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April hingga Mei tahun 1016. Pemilihan informan menggunakan tehnik purposive sampling. Yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan khusus sesuai kriteria riset. Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori:

1. Informan Utama: Mahasiswa aktif asal Bojonegoro penerima Beasiswa Tidak Mampu (Keluarga Miskin/Tugas Akhir) yang kuliah di PTN/PTS, serta mahasiswa miskin yang gagal lolos seleksi akibat kendala regulasi (akreditasi/IPK).
2. Informan Pendukung: Perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro (selaku eksekutif teknis), Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro (selaku pengawas kebijakan), serta pengurus organisasi mahasiswa daerah (Ormada) Bojonegoro.

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis:

- a. Data Primer: Hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan dan catatan hasil observasi lapangan mengenai kendala pencairan dana.
- b. Data Sekunder: Dokumen resmi Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa, data DTSEN/Damisda Bojonegoro, berita media massa terkait keterlambatan pencairan, serta jurnal penelitian terdahulu yang relevan.

Untuk mendapatkan data yang valid dan komprehensif, peneliti menggunakan tiga teknik:

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Dilakukan secara tatap muka maupun daring dengan panduan wawancara semi-terstruktur untuk menggali aspek transparansi, kendala syarat akreditasi, dan dampak keterlambatan pencairan.
2. Studi Dokumentasi: Mengkaji isi regulasi Perbup Bojonegoro No. 42 Tahun 2025 dan arsip pengaduan mahasiswa di media sosial atau posko pengaduan.
3. Observasi: Mengamati proses lini masa pendaftaran dan dinamika pencairan beasiswa pada gelombang berjalan di tahun 2026.

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan mahasiswa penerima manfaat, dokumen evaluasi Dinas Pendidikan, serta regulasi teknis dalam Perbup Bojonegoro No. 42 Tahun 2025, implementasi Beasiswa Tidak Mampu di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan dinamika yang kompleks antara realisasi anggaran yang masif dengan kendala teknis di lapangan.

### 1. Pola Penyaringan dan Ketepatan Sasaran.

Pemkab Bojonegoro telah mengintegrasikan sistem pendaftaran dengan basis data kemiskinan daerah, yakni Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah (Damisda). Secara administratif, proses ini berhasil memangkas potensi manipulasi data ekonomi pendaftar. Melalui pembukaan dua gelombang pendaftaran (Tahap I pada Maret–April dan Tahap II pada Agustus), pemerintah daerah berhasil menjaring ribuan mahasiswa rentan ekonomi untuk mendapatkan pembiayaan UKT *at cost*. Namun, efektivitas jaring pengaman ini tereduksi secara signifikan akibat adanya batasan syarat akreditasi program studi minimal B yang tercantum dalam pasal regulasi teknis.

### 2. Realitas Hambatan Birokrasi dan Lini Masa Pencairan.

Data lapangan menunjukkan adanya deviasi (penyimpangan) waktu yang cukup parah antara kalender akademik universitas dengan waktu pencairan dana oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro. Persoalan birokrasi ini tercermin dari hasil wawancara dengan beberapa informan berikut:

"Kami sering kali harus mencari pinjaman uang ke kerabat atau mahasiswa lain di awal semester karena dana beasiswa dari Pemkab belum cair. (Informan A, Mahasiswa UNUGIRI asal Bojonegoro).

Keterlambatan ini berakar dari panjangnya rantai verifikasi berkas di Dinas Pendidikan yang masih semi-manual, serta lambatnya responsivitas digital dalam melakukan sinkronisasi data dengan pihak perguruan tinggi di luar daerah Bojonegoro.

Untuk membedah sejauh mana efektivitas kebijakan ini, analisis diarahkan pada dua variabel utama: dampak restriksi (pembatasan) regulasi akreditasi dan anomali tata kelola keuangan daerah yang memicu keterlambatan pencairan dana.

#### **a. Bias Kelas dalam Aturan Akreditasi: Sebuah Diskriminasi Struktural**

Syarat wajib akreditasi minimal B bagi program studi penerima Beasiswa Tidak Mampu memicu masalah ketidakadilan baru bagi masyarakat miskin. Kebijakan ini mengasumsikan bahwa semua mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk memilih kampus dengan mutu tinggi. Realitasnya, mahasiswa dari keluarga miskin ekstrem di pelosok Bojonegoro (seperti wilayah Sekar atau Ngraho) sering kali terpaksa memilih perguruan tinggi swasta lokal terdekat atau universitas dengan biaya hidup murah yang program studinya masih berakreditasi C atau sedang dalam proses re-akreditasi. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, salah satu penentu keberhasilan program adalah *karakteristik agen pelaksana dan ukuran kebijakan*. Ketika standar kebijakan dibuat terlalu rigid tanpa melihat karakteristik sosiologis objek kebijakan, maka yang terjadi adalah *policy failure* (kegagalan kebijakan). Pembatasan akreditasi ini membuat Beasiswa Tidak Mampu Bojonegoro bias kelas: ia membantu mahasiswa miskin yang "beruntung" masuk kampus besar berakreditasi baik, namun mengabaikan mahasiswa yang "paling miskin" yang terperangkap di kampus-kampus lokal kecil (Wulandari et al., 2025).

#### **b. Paradox Fiskal Bojonegoro: Anggaran Melimpah, Distribusi Terhambat,**

Kabupaten Bojonegoro dikenal sebagai daerah dengan kapasitas fiskal yang sangat kuat berkat Dana Bagi Hasil (DBH) migas. Sangat paradoks apabila program jaring pengaman sosial pendidikan di daerah sekaya Bojonegoro justru sering diwarnai protes keterlambatan pencairan dana hingga memicu pemanggilan dinas terkait oleh Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro.

Keterlambatan ini membuktikan bahwa kapasitas finansial yang besar tidak serta-merta linear dengan kapasitas birokrasi yang adaptif. Berdasarkan teori implementasi, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana di Dinas Pendidikan Bojonegoro masih mengalami sumbatan informasi. Mahasiswa tidak diberikan akses pelacakan (*tracking system*) yang transparan mengenai posisi berkas pencairan mereka. Dampaknya, fungsi beasiswa yang seharusnya menjadi *social safety net* (jaring pengaman sosial) bergeser menjadi beban psikologis dan finansial baru akibat ketidakpastian waktu pencairan. Secara keseluruhan, program Beasiswa Tidak Mampu Kabupaten Bojonegoro berada pada status efektif secara kuantitas anggaran, namun belum efektif dan belum tepat sasaran secara substansi keadilan akses. Kebijakan ini masih menempatkan mahasiswa sebagai objek administratif, bukan sebagai subjek yang harus dilindungi hak pendidikan tingginya secara utuh.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan Beasiswa Tidak Mampu di Kabupaten Bojonegoro, dapat ditarik dua kesimpulan utama:

1. Belum Sepenuhnya Tepat Sasaran akibat Diskriminasi Regulasi: Meskipun integrasi data pendaftaran dengan DTSN dan Damisda berhasil meminimalisir manipulasi data

ekonomi, kebijakan ini belum sepenuhnya tepat sasaran secara substansi. Syarat kaku akreditasi program studi minimal B menciptakan bias kelas yang mendiskriminasi mahasiswa miskin ekstrem di pelosok Bojonegoro, yang secara sosiologis terpaksa berkuliah di kampus swasta lokal dengan akreditasi prodi di bawah standar tersebut.

2. Kelemahan Tata Kelola Birokrasi (Anomali Fiskal): Melimpahnya APBD Bojonegoro dari sektor migas tidak linear dengan kecepatan distribusi bantuan. Masalah klasik berupa keterlambatan pencairan dana yang bersifat tahunan terjadi akibat panjangnya birokrasi verifikasi manual dan lemahnya komunikasi antarorganisasi. Hal ini mengubah fungsi beasiswa dari jaring pengaman sosial menjadi beban finansial baru karena memaksa mahasiswa mencari pinjaman darurat demi menghindari sanksi akademik kampus.

### Daftar Pustaka

- Andita, E., & Miftakhul, M. (2024). *Analisis kebijakan program beasiswa sepuluh sarjana per desa di Kabupaten Bojonegoro*. CORE.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro 2024*. BPS Kabupaten Bojonegoro.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. (2024). *Juknis program beasiswa pendidikan tinggi*. Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
- Fauzan, M. (2023). *Kesenjangan ekonomi yang berdampak pada pendidikan di Indonesia*. Kompasiana.
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2024). *Beasiswa sepuluh sarjana perdesa, Pemkab Bojonegoro tingkatkan kualitas pendidikan, beri manfaat kurang mampu*. Portal Resmi Kabupaten Bojonegoro.
- Retno, D., & Budi, E. (2013). Pengaruh sektor migas terhadap pengembangan Bojonegoro. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*.
- Sari, E. (n.d.). *Analisis kebijakan program beasiswa sepuluh sarjana per desa di Kabupaten Bojonegoro* [Skripsi, Universitas Bojonegoro]. Repository Universitas Bojonegoro.
- Siswati, E. (2018). Analisis indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Sosioagribis*, 5(1), 531.
- Widayanti, F. I., & Rosdiana, W. (2026). Efektivitas program beasiswa sepuluh sarjana per desa di Kecamatan Kepohbaru. *Jurnal Agile Governance*, 1(1).
- Wulandari, L., Kasiami, S., Subandi, E., Tjatur, K., Studi, P., & Publik, I. A. (2025). Implementasi Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 9(1), 39–46